



BPK Bantah Subjektif

Terkait Opini WDP Terhadap
Laporan Keuangan Pemprov

PONTIANAK - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat membantah bersikap subjektif dalam menilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah

Provinsi Kalbar tahun anggaran 2018. BPK memastikan bahwa penilaian yang dilakukan sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada.

◆ Ke Halaman 7 kolom 1



BPK Bantah Subjektif

Sambungan dari halaman 1

Pernyataan ini disampaikan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalbar, Joko Agus Setyono menyanggah komentar Gubernur Kalbar, Sutarmidji. Seperti diberitakan sebelumnya, Sutarmidji menganggap penilaian BPK cenderung subjektif dalam menilai LKPD Kalbar tahun anggaran 2018. Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD tersebut, Pemprov Kalbar mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Menurut Joko, opini WDP itu diberikan bukan karena faktor subjektivitas melainkan karena memang terjadi realisasi belanja melampaui anggaran dalam APBD 2018. Hal tersebut bersifat material dan memengaruhi penyajian laporan keuangan. Belanja pegawai tercatat sebesar Rp296,63 miliar dan belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota sebesar Rp262,85 miliar. Pergeseran anggaran juga tidak ditetapkan dalam Perda Perubahan APBD TA 2018. Realisasi belanja yang melampaui anggaran dianggap tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

"Itu sebenarnya (dasar BPK memberikan WDP). Kalau (dianggap) subjektif, teman-teman bisa menilai sendiri saya kira," ungkap Joko kepada awak media. Ia menyebutkan, selama ini BPK sudah bekerja sesuai dengan standar yang ada, yakni Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), pedoman manajemen pemeriksaan, serta kode etik yang harus ditaati.

"Dan itu sudah kami ikuti semua, juga hasil pemeriksaan kemarin sudah di-review di tingkat pusat. Jadi kalau ada statement bahwa ini subjektif saya kira jawaban tadi sudah bisa mewakili," katanya.

Memang, lanjut dia, belanja yang melampaui anggaran tersebut ada batas toleransinya. Namun, baik belanja

pegawai maupun belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota sudah melampaui tingkat materialitas. "Yang jelas ada pelampauan batas materialitas. Jadi memang mesti harus ada perda perubahan (anggaran)," ucapnya.

Penjelasan tersebut sekaligus menjawab pernyataan gubernur yang mempertanyakan mengapa LKPD Provinsi Kalbar tahun 2017 bisa meraih WTP, meski kondisi anggaran saat itu mengalami defisit. Saat itu, kata Joko, tidak terjadi perlampauan terhadap batas materialitas sehingga secara penilaian laporan keuangan masih dianggap wajar.

Lalu mengenai salah satu penyebab adanya perubahan atau pergeseran anggaran karena tidak dianggarkannya gaji ke-13 dan THR dalam APBD 2018, Joko mengakui bahwa mestinya hal itu sudah dianggarkan. Jika tidak maka perubahannya wajib dilakukan melalui mekanisme pengesahan APBD Perubahan bersama DPRD.

"Perubahan itu tentunya sesuai prosedur. Ada tata caranya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 317. Kemudian turun Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 tahun 2011," sebutnya.

Ia menilai apa yang sudah dilakukan gubernur sebenarnya merupakan suatu program yang baik. Namun, semestinya hal-hal yang baik itu tetap harus dilakukan sesuai aturan. "Ada aturan harus ada (pengesahan) perubahan (anggaran), ya lakukan perubahan. Apa yang dilakukan Pak Gubernur saya kira sudah cukup baik. Cuma tinggal itu saja, (harus) sesuai dengan ketentuan. Itu yang kami inginkan," harapnya.

Melihat kebijakan gubernur yang menggeser anggaran demi membayar bagi hasil pajak ke pemerintah kabupaten/kota, Joko menyebut semuanya sebenarnya sudah

dianggarkan dalam Perda APBD. Ia merasa tidak mungkin ada pemda yang berniat mencelakakan pemerintahannya sendiri. Semua menurutnya punya tujuan yang baik tergantung pada sudut pandang masing-masing.

"Kalau terkait dengan menyelamatkan saya juga agak sedikit, seperti apa penyelamatan itu. Tapi yang jelas saya kira juga tidak mungkin ada Pemda yang punya niat mencelakakan diri juga ya kan," ujarnya.

Ia pun berkomitmen bahwa dalam penilaian dan pemberian opini untuk seluruh daerah di Kalbar, BPK bekerja secara objektif. Tidak mungkin ada istilah non-prosedural seperti titipan, permainan di belakang atau lain sebagainya. Semua sudah melalui SPKN, standar akuntansi pemerintahan yang dipedomani, serta program pemeriksaan yang diuji.

Pemeriksaannya pun dilakukan secara berjenjang. Ada supervisi dan ada tim yang terdiri dari penanggung jawab, wakil penanggung jawab, pengendali teknis, ketua tim dan anggota tim. Masing-masing dipastikan sudah melakukan fungsinya sesuai program pemeriksaan yang ditetapkan.

"Kemudian ada mekanisme review terhadap hasil pemeriksaan dan kami juga di-review oleh pusat. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin agar tidak ada terkait permainan-permainan seperti itu. Insyallah tidak ada," tutupnya.

Jadikan Pelajaran

Menanggapi polemik antara BPK dengan gubernur ini, Pengamat Kebijakan dan Politik Untan, Dr Erdi Msi, menilai langkah yang diambil gubernur memang ada yang salah jika ditilik dari kaca mata perundang-undangan. Menurutnya, hal seperti ini tidak boleh terulang kembali di masa mendatang.

"Saya duga ini ada penga-

lokasian anggaran tanpa mekanisme (pengesahan) DPRD. Ke depan, sesuai fungsinya, gubernur dengan DPRD harus bisa satu meja, membahas APBD secara tuntas," katanya kepada Pontianak Post, Selasa (28/5).

Meski keputusan gubernur mengalihkan anggaran saat itu memiliki asas manfaat yang besar, tetapi karena prosedurnya salah, manfaat yang besar itu menjadi tak bermakna.



“Kenapa harus melibatkan DPRD, karena itu perintah Perda atau UU, dan aparat publik tidak boleh keluar dari itu. Yang jelas (penurunan) dari WTP ke WDP itu tidak hanya berhubungan dengan kinerja. Lebih banyak ke koordinasi. Ada fungsi dan peran-peran yang tidak dilaksanakan gubernur,” ujarnya.

Dosen Politik Fisip Untan itu berharap gubernur tidak berpikiran negatif terhadap BPK karena tidak mungkin BPK bekerja tanpa menggunakan aturan. Erdi juga memaklumi jika DPRD merasa tidak puas dengan opini WDP karena sejak enam tahun terakhir Pemprov Kalbar selalu meraih WTP.

“Jadi ketika sama-sama pakai aturan, tidak akan ada saling menyalahkan. Yang jelas, ke depan ini harus diperbaiki sehingga pemprov saya harap bisa kembali mendapat WTP, karena persoalan lain sudah tidak ada masalah. Saya harap ini tidak jadi bumbu politik untuk hal-hal yang lain,” pungkasnya.

Hal serupa dikatakan Akademisi Fisip Untan, Dr Zulkarnaen. Menurutnya, meski ada kekecewaan atas opini WDP, apa yang dilakukan BPK juga tetap harus dihargai. Ia berharap semua yang sudah diputuskan memang sesuai dengan kenyataan atau apa adanya. Sebab, percuma jika meraih WTP terus-menerus tetapi di dalamnya justru terjadi penyimpangan-penyimpangan, seperti korupsi dan lain sebagainya.

Kejadian ini dinilai dapat menjadi bahan pelajaran, bahwa perlu ada perencanaan yang kuat agar apa yang dibelanjakan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. “Kalau pun penilaian WDP, tidak buruk juga. Bisa diambil

pelajarannya dari apa yang dinilai kurang” ujarnya.

Kemudian untuk BPK, ia menyarankan agar apapun penilaian yang diberikan, indikatornya perlu disampaikan secara terbuka supaya semuanya bisa terang-bend-

erang. “Tentu kita tidak ingin seakan-akan (BPK) subjektif. Itu harus dihindari. BPK kan memberikan masukan supaya pengelolaan lebih baik. Jadi saya berpikir lebih baik (kejadian ini) ambil sisi positifnya saja,” pungkasnya. **(bar)**